

PERBANDINGAN TATA KELOLA DESA WISATA DI BALI DAN DI JOGJA: STUDI KASUS DESA WISATA PENGLIPURAN DAN DESA WISATA SAMBIREJO

Kristina Samca Susi

Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Daerah

e-mail: krsitinasamcasusi1313@gmail.com

ABSTRAK

Perbandingan adalah teknik analisis yang dilakukan dengan mencari kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih yang dikaji. Dalam artikel ini yang diteliti yaitu tata kelola desa wisata di Bali dan di Jogja dengan objek studi kasus desa wisata Penglipuran dan desa wisata Sambirejo. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan membandingkan tata kelola desa wisata di desa wisata Penglipuran dan desa wisata Sambirejo, dengan menelaah pengelolaan, partisipasi masyarakat, penerapan sapta pesona, promosi dan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Kajian penelitian ini mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur akademik, mulai dari artikel, jurnal, dan skripsi. Hasil analisis dari penelitian ini ditemukan perbedaan konsep pengelolaan antara desa wisata Penglipuran dan desa wisata Sambirejo, kemudian terdapat persamaan partisipasi masyarakat, penerapan sapta pesona, dan promosi yang di desa wisata Penglipuran dan desa wisata Sambirejo, serta sama-sama memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dari hadirnya desa wisata, meskipun di desa wisata Penglipuran terdapat dampak negatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah desa adat dan pengelola pariwisata untuk memperhatikan dampak negatif dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Kata kunci: *Perbandingan, Tata Kelola, Desa Wisata.*

ABSTRACT

Comparison is an analytical technique used to identify similarities and differences between two or more objects under study. This article examines the governance of tourism villages in Bali and Yogyakarta, with the case studies being Penglipuran and Sambirejo. This study aims to identify and compare tourism village governance in Penglipuran and Sambirejo, by examining management, community participation, implementation of the seven charms, promotion, and impacts on the community and the environment. This study collected and reviewed various academic literature, including articles, journals, and theses. The analysis revealed differences in management concepts between Penglipuran and Sambirejo. Furthermore, there are similarities in community participation, implementation of the seven charms, and promotion in Penglipuran and Sambirejo. Both villages have positive impacts on the community and the environment, although there are negative impacts in Penglipuran. The results of this study suggest that traditional village governments and tourism managers should address these negative impacts and provide solutions.

Keywords: *Comparison, Governance, Tourism Village.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan, dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, keragaman budaya yang memesona, serta warisan kuliner yang khas dan otentik. Sebagian besar potensi ini berpusat di wilayah pedesaan, yang menjadi fondasi bagi pengembangan konsep *desa wisata*. Fenomena ini mengubah kawasan pedesaan dari sekadar area agraris menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurut Joshi (dalam Syarifah & Rochani, 2022), *desa wisata* didefinisikan sebagai sebuah bentuk pariwisata

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

terintegrasi yang berlangsung di area perdesaan, mencakup seluruh spektrum pengalaman unik yang ditawarkannya, mulai dari atraksi alam, tradisi budaya yang hidup, hingga berbagai unsur keunikan lokal lainnya. Pengelolaan *desa wisata* ini umumnya merupakan sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), serta seluruh lapisan masyarakat setempat, yang bekerja sama untuk menyajikan pengalaman wisata yang otentik dan berkesan bagi para pengunjung

Secara ideal, pengembangan *desa wisata* memegang peranan yang sangat strategis dalam agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jauh melampaui sekadar fungsi rekreatif, *desa wisata* berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung (Baysha et al., 2024; Widayanto & Supardal, 2025). Lebih dari itu, keberadaannya menjadi benteng pelestarian budaya, di mana tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal tidak hanya dijaga kelestariannya, tetapi juga direvitalisasi dan diperkenalkan kepada khalayak yang lebih luas. Dari perspektif lingkungan, *desa wisata* yang dikelola dengan baik akan mendorong praktik-praktik konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab. Dengan potensi multifaset ini, *desa wisata* idealnya menjadi model pembangunan dari bawah (*bottom-up*) yang mampu memberdayakan komunitas, menjaga harmoni sosial, dan pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata (Aryanto & Widayat, 2025; Sado & Sahdan, 2025).

Untuk mewujudkan potensi ideal tersebut, diperlukan sebuah sistem *tata kelola* (*governance*) yang efektif, transparan, dan partisipatif. Tanpa adanya *tata kelola* yang baik, pengembangan *desa wisata* berisiko mengalami stagnasi, menimbulkan konflik sosial, atau bahkan merusak aset budaya dan lingkungan yang menjadi daya tarik utamanya. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan *tata kelola* sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Bhuiyan et al., 2023; Mendoza et al., 2019). Prinsip-prinsip kunci dalam *tata kelola* yang baik mencakup partisipasi publik yang luas, transparansi dalam pengelolaan, akuntabilitas kepada masyarakat, responsivitas terhadap kebutuhan, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta penegakan supremasi hukum dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks *desa wisata* menjadi sebuah keniscayaan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan secara adil, merata, dan berkelanjutan (Dewi & Ristianti, 2021; Wibowo et al., 2021). Pentingnya kolaborasi multi-stakeholder, termasuk pemerintah desa, komunitas lokal, sektor swasta, dan akademisi, menjadi krusial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pariwisata yang selaras dengan potensi dan kebutuhan spesifik desa (Sado & Sahdan, 2025).

Di antara ribuan destinasi di Indonesia, Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah lama diakui sebagai pusat pariwisata yang unggul, menawarkan perpaduan unik antara wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner. Di tengah lanskap pariwisata yang sangat kompetitif ini, muncul contoh-contoh sukses pengembangan pariwisata berbasis komunitas, yaitu Desa Penglipuran di Bali dan Desa Sambirejo di Yogyakarta. Desa Penglipuran secara global dikenal karena tatanan arsitektur tradisionalnya yang sangat terawat, kebersihan lingkungannya yang luar biasa, serta kehidupan masyarakatnya yang masih memegang teguh *adat* dan kearifan lokal. Sementara itu, Desa Sambirejo di Sleman, Yogyakarta, berhasil mengkapitalisasi lokasinya yang strategis di dekat Candi Prambanan dan Tebing Breksi, menawarkan pesona alam pedesaan dan atraksi budaya yang memikat. Kedua desa ini merepresentasikan model keberhasilan dalam mengelola dan melestarikan potensi unik yang mereka miliki menjadi sebuah produk wisata kelas dunia.

Meskipun keduanya sama-sama mencapai puncak kesuksesan sebagai *desa wisata* unggulan, terdapat sebuah kesenjangan menarik yang layak untuk dikaji lebih dalam: perbedaan mendasar dalam model *tata kelola* yang mereka terapkan. Di sinilah letak permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Keberhasilan Desa Penglipuran sangat ditopang oleh kekuatan lembaga *adat* yang mengakar kuat, di mana setiap keputusan terkait pengembangan desa didasarkan pada musyawarah dan aturan-aturan tradisional yang dihormati bersama. Di sisi lain, Desa Sambirejo kemungkinan besar mengadopsi model *tata kelola* yang lebih modern dan hibrida, yang mungkin melibatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemitraan dengan pihak swasta, dan sinergi yang lebih formal dengan pemerintah daerah. Kesenjangan antara dua pendekatan *tata kelola* yang berbeda satu berbasis tradisi kuat, yang lain berbasis adaptasi modern namun sama-sama menghasilkan kesuksesan, menyajikan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dianalisis secara komparatif.

Studi perbandingan *tata kelola* antara Desa Penglipuran dan Desa Sambirejo menjadi sangat relevan dan strategis. Pemilihan kedua desa ini bukan tanpa alasan; mereka mewakili dua kutub pendekatan yang berbeda dalam spektrum manajemen pariwisata berbasis komunitas di Indonesia. Dengan membandingkan kedua model ini secara berdampingan, penelitian ini dapat mengidentifikasi secara rinci kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan. Analisis ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur organisasi pengelola, mekanisme partisipasi masyarakat, model pembagian keuntungan (*benefit sharing*), strategi pemasaran, hingga cara mereka mengatasi konflik dan tantangan eksternal. Studi kasus komparatif ini akan memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana konteks budaya, sosial, dan kelembagaan yang berbeda dapat melahirkan model-model *tata kelola* yang unik namun sama-sama efektif dalam mencapai keberlanjutan pariwisata.

Metode perbandingan merupakan pendekatan kajian yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih objek untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang objek yang diteliti (Basah dalam Devy et al., 2020). Dalam prosesnya, objek yang dikaji umumnya sudah dikenal, namun pengetahuannya belum jelas dan tegas. Analisis perbandingan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama: deskripsi untuk pengumpulan informasi, klasifikasi informasi berdasarkan kriteria tertentu, dan analisis hasil untuk menemukan pola serta hubungan antar variabel. Studi perbandingan semacam ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kebaikan, keburukan, dan faktor-faktor pembentuk suatu institusi atau sistem yang dikaji.

Dalam penelitian ini, perbandingan *tata kelola* Desa Wisata Penglipuran dan Desa Wisata Sambirejo dikaji melalui lima aspek utama, yaitu pengelolaan, partisipasi masyarakat, sapta pesona, promosi, dan dampak. Aspek pertama, pengelolaan, diartikan sebagai upaya yang menekankan pada kelestarian lingkungan, komunitas, dan nilai sosial untuk kesejahteraan masyarakat lokal (Pitana & Diarta dalam Umar et al., 2023). Aspek kedua adalah partisipasi masyarakat, yang memegang peran krusial karena dapat meningkatkan efektivitas program, mewakili aspirasi warga, dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dalam pengambilan keputusan (Widayuni dalam Wardani, 2021).

Aspek pembanding selanjutnya adalah Sapta Pesona, yang dianggap sebagai kunci kesuksesan sebuah destinasi pariwisata. Penerapan tujuh unsur Sapta Pesona—aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan—merupakan hal esensial yang harus diperhatikan (Ngare dalam Hamzah & Utomo, 2016). Keempat, aspek promosi dianalisis sebagai strategi pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan, baik melalui media online maupun offline. Terakhir, dianalisis pula dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak pariwisata dipahami sebagai pengaruh kuat, baik positif maupun negatif, di mana dampak

positif harus dimaksimalkan sementara dampak negatif perlu dihindari demi keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Prajogo dalam Putri & Saspriatnadi, 2016).

Nilai kebaruan (*novelty*) dan inovasi dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis komparatifnya yang mendalam terhadap dua ikon *desa wisata* di Indonesia. Jika sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada studi kasus tunggal, penelitian ini justru mengambil langkah lebih jauh dengan melakukan analisis silang (*cross-case analysis*) untuk mensintesis pembelajaran dari dua konteks yang berbeda. Inovasinya adalah merumuskan sebuah kerangka kerja konseptual yang dapat menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan *tata kelola desa wisata*, baik yang bersumber dari kekuatan tradisi maupun dari inovasi kelembagaan modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan mendeskripsikan praktik-praktik yang ada, tetapi juga membangun sebuah model analisis yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi *desa wisata* lain untuk merefleksikan dan memperbaiki sistem *tata kelola* mereka sendiri sesuai dengan konteks dan potensi lokal yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi kesenjangan, dan nilai inovasi yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif model *tata kelola* di Desa Wisata Penglipuran, Bali, dan Desa Wisata Sambirejo, Yogyakarta. Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam struktur kelembagaan, proses pengambilan keputusan, dan dampak sosial-ekonomi dari kedua model tersebut. Diharapkan, hasil dari penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi studi pariwisata dan pembangunan perdesaan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang praktis dan aplikatif. Temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan strategis bagi para pengelola *desa wisata*, pemerintah daerah, dan komunitas lokal di seluruh Indonesia dalam upaya mereka untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan studi kasus komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan membandingkan secara mendalam model tata kelola antara dua objek studi, yaitu Desa Wisata Penglipuran di Bali dan Desa Wisata Sambirejo di Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang ekstensif. Proses ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis sistematis terhadap berbagai dokumen dan publikasi yang sudah ada. Sumber data yang digunakan mencakup beragam literatur akademik yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, serta dokumen-dokumen lain yang relevan yang telah dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya. Dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia, penelitian ini bertujuan untuk mensintesis pengetahuan yang ada guna membangun pemahaman yang komprehensif mengenai praktik tata kelola di kedua desa wisata tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan, sehingga memungkinkan analisis perbandingan yang kaya dan mendalam.

Proses pengumpulan data literatur dilakukan secara sistematis untuk memastikan cakupan informasi yang relevan dan memadai. Peneliti melakukan penelusuran pada basis data akademik dan mesin pencari ilmiah dengan menggunakan kata kunci spesifik yang berkaitan dengan kedua desa wisata dan aspek-aspek tata kelola yang dikaji. Setelah data terkumpul, dilakukan proses seleksi dan pengorganisasian informasi berdasarkan kerangka analisis yang telah ditetapkan. Data yang relevan dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan ke dalam lima aspek perbandingan utama untuk memfasilitasi analisis yang terstruktur. Kelima aspek tersebut adalah: (1) model pengelolaan, yang mencakup struktur organisasi dan mekanisme

pengambilan keputusan; (2) tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi; (3) implementasi prinsip-prinsip Sapta Pesona; (4) strategi promosi dan pemasaran yang diterapkan; serta (5) dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat. Kerangka ini menjadi panduan untuk menyusun dan menyajikan data secara sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sofwatillah et al., 2024), yang terdiri dari tiga tahapan utama yang saling terkait. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti secara cermat merangkum, memilih, dan memfokuskan data dari literatur yang relevan dengan kelima aspek perbandingan. Proses ini melibatkan penyederhanaan informasi kompleks menjadi inti yang dapat dianalisis. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana data yang telah direduksi kemudian disajikan secara terorganisir dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan gambar pendukung untuk memudahkan pemahaman dan perbandingan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan pola-pola persamaan dan perbedaan yang muncul dari data yang telah disajikan untuk merumuskan kesimpulan. Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan dengan meninjau kembali data sumber untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik memiliki landasan yang kuat dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil desa wisata Penglipuran dan desa wisata Sambirejo:

1) Desa wisata Penglipuran

Desa wisata Penglipuran berada di wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Yang menjadi daya tarik desa wisata Penglipuran adalah kondisi desa yang bersih, tata ruang Tri Mandala, wilayah hutan yang luas termasuk hutan bambu, ada budaya, dan Loloh Cencem dan Tipat Cantok. Aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan di Desa Penglipuran yaitu seperti mengunjungi pura dan belajar budaya setempat, merasakan menjadi penduduk lokal, mencicipi kuliner khas Desa Penglipuran, membuat kerajinan tangan dari bambu, serta menjelajahi hutan bambu. Desa wisata Penglipuran sebagai salah satu destinasi wisata berkelanjutan.

2) Desa Wisata Sambirejo

Desa wisata Sambirejo, atau yang dikenal dengan nama Dewi Sambi, terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta. Desa ini resmi dinobatkan sebagai desa wisata pada tahun 2015. Salah satu destinasi utama di Desa Sambirejo adalah Tebing Breksi. Tahun 2021 desa wisata Sambirejo berhasil masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Atas prestasi tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno, secara langsung menyerahkan penghargaan yang didasarkan pada penilaian tim juri Anugerah Desa Wisata (ADWI).

Temuan dari desa wisata Penglipuran dan desa wisata Sambirejo:

1). Desa wisata Penglipuran

Desa wisata Penglipuran tentunya memiliki prestasi yang benar-benar harus dibanggakan seperti mendapat penghargaan Kalpataru pada tahun 1995 karena keasrian lingkungan desa, berhasil meraih peringkat 3 sebagai desa bersih dalam majalah Internasional Bombastic pada tahun 2016. Pada tahun 2017, desa Penglipuran pernah didaulat sebagai desa dengan pelestarian budaya tradisional terbaik melalui penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) tahun 2017 dan pernah meraih rangk 100 Top Tourism Destination versi Green Destinations Foundation. Prestasi-prestasi tersebut tentunya tidak mudah didapatkan perlu adanya usaha dan

tata kelola yang baik dari pemerintah desa adat dan pengelola pariwisata. Desa wisata Penglipuran langsung ditangani oleh Bendesa Adat bukan menggunakan sistem kepala desa. Dalam bidang administrasi secara langsung ditangani oleh desa adat serta langsung berhubungan dengan pemerintah kabupaten Bangli tanpa melalui Kelurahan Kubu hanya sebatas dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga melalui Kepala Lingkungan. Pengelolaan desa wisata Penglipuran berada di bawah naungan desa adat. Lembaga pengelola dibentuk pada tahun 2012 sebagai respon terhadap kebutuhan akan tenaga profesional dalam mengembangkan pariwisata di desa wisata Penglipuran.

Desa wisata Penglipuran mengadopsi model pengelolaan berbasis masyarakat yang berorientasi pada kearifan lokal. Selama proses mengembangkan pariwisata pihak pengelola desa Penglipuran melaksanakan kolaborasi atau kerjasama dengan bentuk *pentahelix*. Partisipasi masyarakat tentunya sangat diperlukan, sejak perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi penataan desa wisata Penglipuran, masyarakat selalu dilibatkan dan melibatkan diri dan model pengelolaan ini adalah model yang paling dianggap cocok oleh masyarakat setempat. Dalam menjalankan atau mengelola desa wisata sapta pesona adalah hal yang paling utama yang harus dijalankan. Seperti desa wisata Penglipuran yang selalu mengupayakan sapta pesona untuk diterapkan. Upaya pemerintah desa adat, pengelola dan masyarakat setempat dalam mewujudkan dan menjalankan sapta pesona sangat baik. Tujuh unsur sapta pesona dijalankan dan diwujudkan dengan baik dan nyata. Unsur sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Dalam mengembangkan suatu desa wisata tentunya perlu yang namanya promosi agar desa wisata tersebut banyak dikunjungi oleh wisatawan yang kemudian memberikan dampak positif. Dalam promosi desa Wisata Penglipuran, pihak pengelola pariwisata dan pemerintah desa adat berkolaborasi dengan berbagai kalangan dalam mempromosikan dan membangun daya tarik baru ini seperti pihak swasta, pihak akademisi, pihak masyarakat dan media.

Desa wisata dibentuk dengan tujuan agar memberikan dampak positif untuk pemerintah desa, pengelola pariwisata dan masyarakat. Desa wisata Penglipuran memiliki dampak positif bagi masyarakat yaitu terciptanya lapangan kerja, terciptanya lingkungan yang bersih, peningkatan UMKM, terciptanya rumah warga yang dijadikan homestay, terdapat donasi sosial untuk melestarikan lingkungan hutan bambu, tradisi budaya masyarakat yang lestari. Selain itu terdapat sejumlah dampak positif antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, adanya pengelolaan limbah cair maupun limbah padat yang baik, serta upaya konservasi sumber daya alam berupa hutan bambu. Dampak positif lainnya seperti terciptanya pelestarian kesenian dan kebudayaan melalui penyelenggaraan acara tahunan yang disebut Penglipuran *Village Festival*, adanya perawatan bangunan tradisional khas Desa Wisata Penglipuran, serta peningkatan pendapatan masyarakat melalui penjualan berbagai produk seperti souvenir, penyewaan pakaian adat Bali dan usaha warung. Selain itu pendapatan dari hasil penjualan tiket masuk wisatawan turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana (Nirmala et al., 2024). Berdasarkan penelitian dari Nirmala et al., (2024) dampak negatifnya yaitu adanya kerusakan lingkungan dan kerusakan jalan menuju desa wisata, berubahnya pola pikir dan berubahnya gaya hidup masyarakat lokal, dan masyarakat jadi bergantung terhadap sektor pariwisata untuk menambah pendapatan ekonomi serta pendapatan masyarakat lokal yang tidak menentu



Gambar 1. Desa wisata Penglipuran



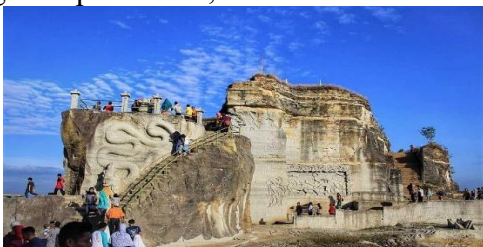
Gambar 2. Hutan Bambu

2). Desa Wisata Sambirejo

Wisata Tebing Breksi adalah milik pemerintah desa Sambirejo, kemudian diserahkan kepihak Badan Usaha Milik Desa untuk dikelola. Desa wisata Sambirejo dengan objek wisata Tebing breksi menerapkan sistem pengelolaan dengan memanfaatkan konsep wisata berbasis *heritage*, yaitu mengintegrasikan sejarah dan budaya lokal dengan pariwisata modern. Kolaborasi dilakukan dengan sanggar seni serta kegiatan masyarakat adat seperti wiwitan dan festival budaya yang menampilkan kirab budaya, jatilan, serta tari-tarian. Partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan guna untuk mengelola desa wisata. Di desa wisata Sambirejo dengan objek wisata Tebing Breksi masyarakat dijadikan sebagai pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam mengelola dan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, masyarakat juga diberikan pendidikan nonformal untuk melayani wisatawan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Widyaningsih (2020) diketahui bahwa penerapan sapta pesona telah terlaksana dengan baik di obyek wisata Tebing Breksi Sambirejo. Hasil observasi dan wawancara dengan para pelaku wisata di obyek wisata bahwa aspek aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diraih oleh pengelola pariwisata dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan setiap hari. Promosi memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan desa wisata guna menarik wisatawan berkunjung. Promosi wisata Tebing Breksi dilakukan secara offline dan online. Promosi online memanfaatkan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok, Google Maps dan Situs Web, sedangkan promosi offline dilakukan melalui informasi dari mulut ke mulut. Pengembangan objek wisata ini mendapat dukungan kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Dengan adanya desa wisata Tebing Breksi di desa Sambirejo secara langsung memberikan manfaat yang sangat positif untuk masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Widyaningsih (2020) bahwa masyarakat Desa Sambirejo secara langsung mendapatkan dampak positif yaitu dapat menggerakkan ekonomi keluarganya yang tadinya banyak berprofesi petani atau penambang batu kemudian beralih menjadi pelaku wisata dan pengelola pariwisata, dan dalam hal ini menjadi bagian dari BUMDes di Desa Sambirejo.



Gambar 3. Tebing Breksi



Gambar 2. Event Gumregah Culture Festival

Pembahasan

Penelitian ini menyajikan analisis komparatif yang mendalam terhadap dua model pengembangan desa wisata yang berhasil di Indonesia, yaitu Desa Wisata Penglipuran dan Desa Wisata Sambirejo. Temuan utama mengungkapkan bahwa meskipun keduanya berangkat dari filosofi pengelolaan yang berbeda—Penglipuran dengan pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) yang organik dan Sambirejo dengan konsep *heritage tourism* yang lebih terstruktur—keduanya mencapai kesuksesan melalui konvergensi pada prinsip-prinsip fundamental. Prinsip-prinsip ini mencakup partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, implementasi standar pelayanan nasional *Sapta Pesona*, strategi promosi yang modern, dan penciptaan dampak ekonomi positif bagi komunitas lokal. Dengan demikian, pembahasan ini akan menguraikan bagaimana dua jalur yang berbeda ini dapat menjadi model bagi pengembangan desa wisata lain, sambil menyoroti tantangan keberlanjutan yang melekat pada setiap pendekatan.

Perbedaan paling mendasar antara kedua desa wisata terletak pada model pengelolannya. Penglipuran mengadopsi pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) yang murni, di mana pengelolaan berada di bawah naungan desa adat, memastikan bahwa setiap keputusan berakar pada kearifan lokal dan keuntungan didistribusikan secara komunal, sejalan dengan definisi yang diuraikan oleh Suganda (2018). Sebaliknya, Sambirejo menerapkan model *heritage tourism* yang lebih formal, dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan fokus pada pengembangan aset spesifik, yaitu Tebing Breksi. Pendekatan ini, meskipun efektif, membawa risiko inheren berupa potensi konflik antara kepentingan konservasi warisan budaya dengan tuntutan komersialisasi pariwisata. Seperti yang terjadi di Sawahlunto (Azizah & Sukmawati, 2024), menjaga keseimbangan ini menjadi tantangan jangka panjang yang harus diantisipasi oleh pengelola Desa Wisata Sambirejo.

Meskipun model pengelolaan mereka berbeda, faktor kunci yang menyatukan keberhasilan kedua desa adalah tingkat partisipasi masyarakat yang luar biasa tinggi. Baik di Penglipuran maupun Sambirejo, masyarakat bukan hanya menjadi objek, melainkan subjek utama dalam seluruh siklus pariwisata, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan aktif ini menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) yang mendalam, yang pada gilirannya menjamin keaslian pengalaman yang ditawarkan kepada wisatawan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Temuan ini memberikan penegasan empiris yang kuat terhadap kesimpulan Anarta dan Darwis (2025), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah elemen yang tidak dapat ditawar dalam pariwisata berbasis komunitas, karena ia secara langsung meningkatkan kualitas layanan, pemberdayaan lokal, dan pelestarian budaya.

Keberhasilan dalam menarik dan memuaskan wisatawan di kedua lokasi juga ditopang oleh implementasi yang konsisten terhadap tujuh pilar *Sapta Pesona*. Komitmen terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam pengelolaan. Ini membuktikan bahwa keunikan daya tarik alam atau budaya saja tidak cukup; ia harus didukung oleh kualitas pelayanan dan pengalaman pengunjung yang prima, sebagaimana ditekankan dalam studi oleh Setiawati et al. (2020). Dengan menerapkan standar nasional ini, kedua desa wisata berhasil meningkatkan daya saing mereka dan membangun citra destinasi yang positif, menunjukkan bahwa inisiatif lokal dapat mencapai keunggulan ketika dipadukan dengan praktik terbaik dalam industri pariwisata.

Dalam era digital, strategi promosi yang efektif menjadi krusial, dan kedua desa wisata menunjukkan kematangan dalam aspek ini. Keduanya menerapkan pendekatan pemasaran hibrida yang menggabungkan metode *offline* tradisional, seperti promosi dari mulut ke mulut, Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

dengan strategi *online* yang agresif melalui pemanfaatan media sosial dan multimedia. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Rizal et al. (2023) dan Wahyudin et al. (2021) mengenai pentingnya *brand awareness* digital. Secara khusus, model kolaborasi penta-helix yang diterapkan oleh Penglipuran—melibatkan akademisi, swasta, media, dan pemerintah—menunjukkan sebuah strategi promosi yang canggih dan terintegrasi, yang dapat menjadi contoh bagi desa wisata lain dalam upaya memperluas jangkauan pasar mereka dari lokal menjadi global.

Analisis dampak pariwisata pada kedua desa menunjukkan gambaran pedang bermata dua. Di satu sisi, keduanya berhasil menciptakan dampak ekonomi positif yang signifikan, seperti peningkatan lapangan kerja dan pergerakan ekonomi lokal, sebuah manfaat yang juga ditemukan dalam penelitian oleh El Yamin et al. (2024). Namun, kasus Penglipuran yang lebih matang menyajikan sebuah pelajaran penting tentang sisi negatif dari kesuksesan. Munculnya dampak negatif seperti ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor pariwisata, pergeseran pola pikir masyarakat, dan tekanan terhadap lingkungan adalah tantangan jangka panjang yang tak terhindarkan, sejalan dengan analisis dampak oleh Lazuardina dan Amalia G. (2023). Desa Wisata Sambirejo, yang relatif lebih baru, harus belajar dari pengalaman Penglipuran untuk merancang strategi mitigasi sejak dini.

Implikasi dari studi komparatif ini sangat berharga bagi para perencana dan pengelola desa wisata di seluruh Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satu formula tunggal untuk sukses; baik model yang berakar kuat pada tradisi adat maupun model yang lebih berorientasi pada pengelolaan aset modern dapat berhasil. Namun, keberhasilan tersebut mensyaratkan adanya elemen-elemen universal: partisipasi komunitas yang mendalam, komitmen terhadap standar kualitas pelayanan, strategi promosi yang adaptif, dan yang terpenting, perencanaan proaktif untuk mengelola dampak negatif. Studi ini menawarkan sebuah kerangka kerja bagi desa-desa lain untuk mengidentifikasi model pengelolaan yang paling sesuai dengan konteks lokal mereka, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar pariwisata berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Analisis yang disajikan didasarkan pada studi literatur dan data sekunder, sehingga tidak melibatkan pengamatan lapangan atau wawancara primer oleh peneliti. Keterbatasan yang paling signifikan adalah asimetri informasi mengenai dampak negatif, di mana data untuk Penglipuran cukup terperinci, sementara untuk Sambirejo dinyatakan "belum ditemukan". Hal ini bisa jadi karena perbedaan tingkat kematangan kedua destinasi atau keterbatasan data yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian di masa depan sangat disarankan untuk melakukan studi lapangan komparatif secara langsung di kedua lokasi. Sebuah studi longitudinal terhadap Desa Wisata Sambirejo akan sangat bernilai untuk melacak apakah desa tersebut akan mulai mengalami dampak negatif serupa seiring dengan perkembangannya, yang akan memberikan wawasan lebih dalam tentang siklus hidup desa wisata.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini yang peneliti analisis yaitu tentang perbandingan tata kelola desa wisata Penglipuran dan desa wisata Sambirejo, pokok pembahasannya yaitu terkait bagaimana pengelolaannya, partisipasi masyarakat, penerapan sapta pesona, promosi dan dampak bagi masyarakat serta lingkungan. Terdapat perbedaan pengelolaan antara desa wisata Penglipuran dan desa wisata Sambirejo. Perbedaan mulai dari siapa yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan konsep pengelolaan yang digunakan. Perbedaan pengelolaan tersebut tentunya berbeda kemungkinan dikarenakan beberapa faktor yaitu seperti faktor wilayah, lingkungan dan sosial masyarakat, meskipun demikian kedua desa wisata tersebut memiliki visi yang sama

yaitu mensejahterakan masyarakat, pengelola pariwisata dan pemerintah desa. Kemudian daei segi partisipasi masyarakat.

Masyarakat sangat memiliki pasrtisipasi yang baik dalam pengelolaan desa wisata di kedua desa wisata tersebut. Masyarakat, pengelola pariwisata dan pemerintah desa di dua desa wisata tersebut sama-sama sudah menerapkan sapta pesona, begitu juga dengan promosi, kedua desa tersebut sudah melakukan berbagai macam usaha untuk mempromosikan desa wisata, baik itu promosi online maupun offline. Terakhir yaitu dampak desa wisata bagi masyarakat dan lingkungan. Kedua desa wisata tersebut tentunya memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, namun keberadaan desa wisata juga tidak terlepas dari dampak negatifnya. Seperti yang ada di desa wisata Penglipuran terdapat dampak negatif yaitu adanya kerusakan lingkungan, kerusakan akses menuju desa wisata, perubahan cara berpikir dan gaya kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar, masyarakat menjadi ketergantungan terhadap sektor pariwisata dan pendapatan masyarakat lokal yang tidak menentu. Oleh karena adanya dampak negatif tersebut pemerintah desa adat dan pengelola pariwisata harus lebih memperhatikan lagi terkait kerusakan-kerusakan lingkungan atau dampak yang ditimbulkan dan memberikan solusi serta himbauan kepada masyarakat agar gaya hidup masyarakat tidak ada perubahan yang jauh dan agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung mencari pendapatan di desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anarta, F., & Darwis, R. S. (2025). Pentingnya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pariwisata berbasis masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 212–220. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.59114>
- Aryanto, S. D., & Widayat, T. N. E. (2025). Kolaborasi media sosial dalam mendukung keberhasilan desa wisata: Studi kasus Desa Wisata Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 630. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5730>
- Azizah, S., & Sukmawati, P. (2024). Strategi pengelolaan pariwisata heritage di Kota Sawahlunto untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. *Journal of Tourism Sciences, Technology and Industry*, 3(2).
- Baysha, M. H., et al. (2024). Peran pemasaran digital dalam mempromosikan pariwisata Tandung Andung Desa Lendang Ara. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 112. <https://doi.org/10.51878/community.v4i2.3323>
- Bhuiyan, M. A., et al. (2023). Does good governance promote sustainable tourism? A systematic review of PESTEL analysis. *SN Business & Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.1007/s43546-022-00408-x>
- Devy, et al. (2020). Perbandingan kualitas pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL). *Pemerintahan Integratif*, 8(1), 2.
- Dewi, S. P., & Ristianti, N. S. (2021). Sustainable rural tourism meaning for community livelihood. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 23(2), 83. <https://doi.org/10.15294/jtsp.v23i2.29320>
- El Yamin, D. A., et al. (2024). Dampak pariwisata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wisata Karangrejo melalui community based tourism (CBT). *Jurnal Nasional Pariwisata*, 14(2), 108. <https://doi.org/10.22146/jnp.100584>
- Hadi, W., & Widyaningsih, H. (2020). Implementasi penerapan sapta pesona wisata terhadap kunjungan wisatawan di Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal Pariwisata Dan Budaya*, 11, 127–136. <https://doi.org/10.31294/khi.v11i2.8862>

- Hamzah, F., & Utomo, E. T. (2016). Implementasi sapta pesona pada Museum Mandala Wangsit Siliwangi Kota Bandung. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 118–128.
- Lazuardina, A., & Amalia G., S. (2023). Dampak pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal di kawasan wisata (Desa Ciburial Kabupaten Bandung). *Warta Pariwisata*, 21(2), 42–47. <https://doi.org/10.5614/wpar.2023.21.2.02>
- Mendoza, H. M., et al. (2019). Stakeholders of cultural heritage as responsible institutional tourism product management agents. *Sustainability*, 11(19), 5192. <https://doi.org/10.3390/su11195192>
- Nirmala, I. G. A. A. N., et al. (2024). Dampak pengembangan desa wisata terhadap lingkungan sosial budaya dan ekonomi di Desa Wisata Penglipuran. *Jurnal Daya Tarik Wisata (JDTW)*, 6(1), 8–21.
- Permana, A. R., & Bausad, A. A. (2024). Perbandingan minat belajar siswa MAN 1 Mataram dan SMAN 7 Mataram pada mata pelajaran pendidikan jasmani. *Jurnal Penelitian, Pengembangan Pembelajaran dan Teknologi*, 2.
- Putri, V. J., & Saspriatnadi, M. (2016). Analisis dampak fisik pariwisata dan ekowisata dengan environmental impact assessment. *Jurnal Arsitektur Lanskap*, 3.
- Rizal, C., et al. (2023). Optimalisasi promosi dalam pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat Desa Sei Limbat. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 2(2), 176–181. <https://doi.org/10.62712/juribmas.v2i2.118>
- Sado, J. C., & Sahdan, G. (2025). Pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Detusoko Barat Kabupaten Ende. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 466. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5737>
- Sofwatillah, et al. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Suganda, A. D. (1970). Konsep wisata berbasis masyarakat. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 4(1), 29–41. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v4i1.2181>
- Syarifah, R., & Rochani, A. (2022). Studi literatur: Pengembangan desa wisata melalui community based tourism untuk kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 109. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19983>
- Umar, L. F., et al. (2023). Pengelolaan desa wisata berbasis community based-tourism di Desa Adat Osing Kemiren, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(2), 54–62.
- Wahyudin, A., et al. (2021). Pemanfaatan multimedia dalam pengembangan dan promosi potensi Desa Wisata Adiluhur Kebumen. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/aks.v5i2.3988>
- Wardani, N. A. (2021). *Pengembangan desa wisata (Studi di Desa Wisata Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus)*.
- Wibowo, A., et al. (2021). Development of a language tourism village based on environmental ethics and social entrepreneurship (a case study in Karanganyar Regency, Central Java, Indonesia). *E3S Web of Conferences*, 317, 02015. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131702015>
- Widayanto, E., & Supardal, S. (2025). Kolaborasi antara pemerintah Kalurahan Tepus dan Dinas Pariwisata dalam mencapai indikator kinerja utama sektor pariwisata. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 794. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6447>